ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PERENCENAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU PADA KELURAHAN MAULAFA TAHUN 2022-2024

Pembimbing I : **Dr.Nitaniel Hendrik.M.,Si**

Pembimbing II : **Mesri W.N.Manafe SE.,M.Sc**

Nama : **Prisilia Risna Nahak**

NIM **22190094**

Program studi : **Akuntansi**

Tahun penulisan **2026**

Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat pemerintahan kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu, mengidentifikasi kesesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Kelurahan Maulafa selama periode tahun 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu Sekretaris Kelurahan dan Bendahara Kelurahan Maulafa. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan temuan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu di Kelurahan Maulafa telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap Musrenbang, penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hingga pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

Secara prosedural telah terdapat keterpaduan antara kedua dokumen, namun secara substansial tingkat kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dianggarkan mencapai 75–85%, di mana sekitar 70% usulan prioritas masyarakat dari hasil

Musrenbang dapat terakomodasi dalam dokumen anggaran. Faktor pendukung utama meliputi partisipasi masyarakat yang aktif, dukungan regulasi yang jelas, komitmen aparatur kelurahan, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sedangkan faktor penghambat yang paling dominan adalah keterbatasan alokasi anggaran, keterbatasan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia, koordinasi yang belum optimal dengan instansi teknis terkait, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Kata kunci: Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, Kelurahan Maulafa, Musrenbang, Kesesuaian Dokumen, Tata Kelola Pemerintahan.